

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang memiliki kurang lebih 17.000 pulau di dalamnya, yang kemudian menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara kepulauan terbesar di dunia. Dengan predikat yang dimilikinya, Indonesia dianugerahi dengan kelimpahan sumber daya alam yang luar biasa, keanekaragaman budaya, serta beranekaragam flora dan fauna. Selain itu, Indonesia juga menjadi salah satu negara dengan jumlah penduduk terbanyak urutan ke-4 dunia dengan jumlah penduduk mencapai 267 juta jiwa (Sensus Penduduk:2019). Akan tetapi, berbagai masalah publik juga turut hidup berdampingan dengan kelimpahan tersebut, salah satunya diantaranya ialah masalah kemiskinan.

Menurut Kepala Badan Pusat Statistik (BPS:2018) Suhariyanto dalam seminar nasional *official statistics* mengatakan bahwa kemiskinan menjadi salah satu tantangan besar yang perlu dituntaskan. Dibutuhkan formula kebijakan yang baik dalam menyelesaikannya karena selama ini kemiskinan menjadi hal yang cukup menakutkan bagi perkembangan negara, baik negara berkembang maupun negara maju. Menurut Suhariyanto, saat ini pemerintah sudah memprioritaskan kemiskinan untuk segera dituntaskan dengan menjadikannya sebagai salah satu prioritas pembangunan yang perlu dievaluasi dari waktu ke waktu.

Persentasi penduduk miskin di Indonesia pada September 2019 sebesar 9,22%, angka ini menurun 0,19% poin terhadap Maret 2019 dan menurun 0,44% terhadap September 2018 (BPS,2019). Jumlah penduduk miskin pada September 2019 sebesar

24,78 juta orang, menurun 0,36 juta orang terhadap Maret 2019 dan menurun 0,88 juta orang terhadap September 2018. Melihat presentase di atas, jumlah penduduk miskin di Indonesia pada era Jokowi (Sep 2014-Maret 2019) mengalami penurunan sebesar 2,6 juta jiwa.

Pada tahun 2020 angka kemiskinan di Indonesia mencapai 26,42 juta jiwa atau sekitar 9,78 % dari jumlah penduduk Indonesia (BPS,2020). Angka kemiskinan ini mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2019 sebagai salah satu dampak adanya pandemi COVID-19 yang masih melanda dunia termasuk Indonesia. Jika dibandingkan dengan tahun 2019, angka kemiskinan di Indonesia pada Maret 2020 mengalami peningkatan sebanyak 0,56 % poin terhadap September 2019 dan meningkat 0,37% terhadap Maret 2019. Sementara itu, jumlah penduduk miskin Maret 2020 di daerah perkotaan mengalami peningkatan sebanyak 1,3 juta orang dan daerah pedesaan naik sebanyak 339,9 ribu orang (BPS,2020). Angka ini tergolong cukup besar jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelum terjadinya pandemi COVID-19. Hal ini tentunya membutuhkan penanganan serius dari pemerintah terutama untuk mengurangi angka kemiskinan.

Sebagai negara berkembang, masalah kemiskinan merupakan salah satu persoalan dari sekian masalah publik lainnya yang selalu dihadapi Indonesia setiap tahunnya, baik di daerah perkotaan maupun di daerah pedesaan. Angka kemiskinan di daerah perkotaan maupun pedesaan memiliki presentasi yang cukup beragam, salah satunya ialah angka kemiskinan Kota Malang. Kota Malang merupakan salah satu kota dengan penduduk terbanyak di wilayah provinsi Jawa Timur. Jika dilihat dari keadaan sosial ekonominya, Kota Malang berada pada peringkat kedua setelah

Surabaya. Akan tetapi, masalah kemiskinan di Kota Malang masih menjadi salah satu penghambat kemajuan kota tersebut. Pemberantasan kemiskinan merupakan salah satu fokus dari Pemerintah Kota Malang saat ini karena angka kemiskinan Kota Malang yang masih tergolong cukup tinggi. Sebagai kota metropolitan kedua setelah Surabaya, tentunya pemerintah Kota Malang menaruh perhatian khusus pada masalah kemiskinan di Kota Malang terlebih lagi jika melihat presentase angka kemiskinan Kota Malang yang mengalami peningkatan setiap tahunnya.

Persentase penduduk miskin Kota Malang pada Maret 2019 mencapai 4,07 persen. Garis kemiskinan Kota Malang berada pada level Rp 543.966,- per kapita per bulan atau meningkat sekitar 36,8 ribu rupiah jika dibandingkan dengan Garis kemiskinnan pada tahun 2018. Berdasarkan data tersebut, maka jumlah penduduk miskin dilihat dari jumlah penduduk Kota Malang ialah sejumlah 35.390 jiwa dan mengalami penurunan sebanyak 0,03 % dibanding tahun 2018. Pada tahun 2018, jumlah penduduk miskin Kota Malang sejumlah 35.490 jiwa (BPS Kota Malang, 2019).

Kemiskinan perlu diatasi dengan baik karena jika tidak diatasi maka dapat berakibat pada munculnya masalah-masalah yang cukup konkret. Berbagai masalah sosial akan muncul seiring dengan adanya kemiskinan dan hal ini tentu menjadi PR besar bagi pemerintah untuk meminimalisir adanya penyakit-penyakit sosial sebagai dampak dari kemiskinan tersebut. Menurut Kwik Kian Gie (Karnadji & Sudarso 2005:14) jika kemiskinan tidak segera ditangani maka dampaknya adalah :
(1)tingginya beban ekonomi yang harus ditanggung masyarakat, (2) rendahnya kualitas dan produktivitas sumber daya manusia, (3) rndahnya partisipasi aktif

masyarakat dalam berbagai kegiatan pembangunan, (4) menurunnya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, (5) menurunnya kepercayaan masyarakat pada birokrasi dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat, (6) kemungkinan terjadinya kemerosotan mutu generasi mendatang.

Di antara masalah-masalah sosial tersebut, yang paling sering dijumpai di kehidupan sehari-hari ialah gelandangan dan pengemis. Hal ini disebabkan karena kurangnya ketersediaan lapangan pekerjaan serta kurangnya pendidikan yang kemudian menjadi alasan para orangtua untuk menjadikan anaknya ikut mengemis maupun mengamen. Fenomena ini bisa kita jumpai di lampu merah, stasiun Kota, terminal bahkan di warung-warung pinggir jalan. Tentunya hal ini mengakibatkan munculnya ketidaknyamanan bagi masyarakat lain. Selain itu, fenomena lain yang bisa dijumpai disampaikan oleh walikota Malang yakni masih begitu banyak masyarakat miskin Kota Malang yang tinggal di bantaran sungai atau Daerah Aliran Sungai (DAS).

Melihat fenomena-fenomena di atas, maka pemerintah menyediakan berbagai program kebijakan yang setidaknya bisa meminimalisir tingkat kemiskinan, baik di perkotaan maupun di pedesaan. Berbagai program tersebut memiliki sasaran dan target yang berbeda-beda namun memiliki satu visi yang sama yakni menekan angka kemiskinan. Ada berbagai program yang dibuat oleh pemerintah untuk menekan angka kemiskinan di Indonesia dan diantaranya ialah Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Indonesia Pintar (KIP), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kredit Usaha Rakyat dan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU). Salah satu program yang menjadi andalan pemerintah dalam mengatasi

kemiskinan ialah program keluarga harapan (PKH) yang mulai dilaksanakan sejak tahun 2007. Melalui program ini, diharapkan masyarakat miskin dapat dengan mudah mengakses berbagai fasilitas pelayanan publik, misalnya layanan kesehatan dan pendidikan.

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga miskin (KM) yang telah ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH. Sebagai upaya pencegahan penanggulangan kemiskinan, sejak tahun 2007 Pemerintah Indonesia telah melaksanakan PKH. Program Perlindungan Sosial yang juga dikenal di dunia internasional dengan istilah *Conditional Cash Transfers* (CCT) ini terbukti cukup berhasil dalam menanggulangi kemiskinan yang dihadapi di negara-negara tersebut, terutama masalah kemiskinan kronis. PKH diarahkan untuk menjadi episentrum dan *center of excellence* penanggulangan kemiskinan yang mensinergikan berbagai program perlindungan dan pemberdayaan sosial nasional.

Pelaksanaan PKH di Indonesia sudah berjalan selama 13 tahun dan sudah memberikan kontribusi yang cukup baik dalam penuntasan kemiskinan. Menurut mantan Menteri Sosial RI, jumlah presentase kemiskinan turun menjadi 9,66% pada tahun 2018. Menurunnya angka kemiskinan ini disebabkan karena adanya program PKH yang berfokus pada ibu-ibu hamil/menyusui, anak sekolah (7-21 tahun), penyandang disabilitas dan usia lanjut di atas 60 tahun. Menurutnya, PKH menjadi program prioritas nasional karena mempunyai dampak langsung yang signifikan terhadap pengurangan kemiskinan dan kesenjangan, yakni dengan meningkatkan daya beli masyarakat yang kurang mampu melalui bantuan sosial non tunai yang

diberikan. Keberhasilan dari pelaksanaan program ini ditentukan dari pelaksana program, pendamping program, keluarga penerima manfaat dan pemerintah setempat.

Berdasarkan hasil penelitian awal, tatakelola pelaksanaan program bantuan PKH di Kelurahan Pisang Candi mulai dilaksanakan sejak tahun 2013. Pengelolaan pelaksanaan bantuan PKH memiliki beberapa masalah yang menjadi kendala dalam pelaksanaannya sendiri. Hasil penelitian awal yang dilakukan, ditemukan beberapa masalah pengelolaan bantuan PKH di Kelurahan Pisang Candi terutama berkaitan dengan perencanaan, pengawasan, kerja sama antar pendamping dan masyarakat, komunikasi antar pendamping, kevalidan data yang tidak sesuai dengan kondisi real masyarakat serta sosialisasi yang kurang dilaksanakan seoptimal mungkin karena kendala waktu. Masalah yang muncul dalam pengelolaan PKH ini bisa dilihat dari KPM yang tidak tergolong masyarakat miskin tetapi masih menerima bantuan. Hal ini menjadi salah satu masalah dalam perencanaan awal dalam bentuk penginputan data yang tidak sesuai dengan kriteria calon penerima manfaat. Ada beberapa masyarakat yang memalsukan kriteria misalnya ukuran rumah dibuat seminimal mungkin agar bisa tergolong ke dalam penerima manfaat.

Masalah lain yang muncul adalah dari pelaksana atau pendamping PKH. Pelaksana kurang bekerja sama dengan relawan dan organisasi kemasyarakatan lainnya. Hal ini akan berdampak pada informasi-informasi yang diberikan tidak sesuai dengan kriteria program. Komunikasi yang terjalin antara masyarakat dan pembina sosial kurang dilaksanakan dengan begitu baik dan menyebabkan adanya miskomunikasi antara keduanya. Seharusnya, komunikasi yang terjalin diantara para

pendamping maupun relawan sebisa mungkin berjalan secara dua arah agar menghindari adanya bias informasi dari pemerintah pusat kepada daerah. Selain itu, partisipasi masyarakat dalam mengikuti kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh pendamping kurang begitu aktif. KPM PKH di Kelurahan Pisang Candi masih memiliki minat yang rendah dalam menjalankan kewajiban yang dimiliki oleh KPM tersebut.

Dari beberapa ulasan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul penelitian **Tata Kelola Program Keluarga Harapan (Studi Kasus pada Kelurahan Pisang Candi berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan)**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini ialah sebagai berikut :

1. Bagaimana tatakelola PKH di Kelurahan Pisang Candi berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan?
2. Faktor apa saja yang mempengaruhi tatakelola PKH di Kelurahan Pisang Candi Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan tatakelola PKH di Kelurahan Pisang Candi berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan.
2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi tatakelola PKH di Kelurahan Pisang Candi berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini ialah:

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini sedikit banyak akan memberikan kontribusi dalam pengembangan kasanah ilmu administrasi publik
- b. Mampu memberikan proses pembelajaran yang sangat berarti bagi peneliti yang mengawali menggeluti bidang ilmu administrasi publik.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam penanggulangan masalah-masalah dalam pengelolaan bantuan PKH di kelurahan Pisang Candi.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan atau referensi bagi peneliti lain tentang tatakelola pelaksanaan bantuan PKH di Kelurahan Pisang Candi..

